

NAN

**PENGARUH BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA
DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



Skripsi Oleh :

ADI SUPARDI
01071002084
Ekonomi Pembangunan

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

(2012)

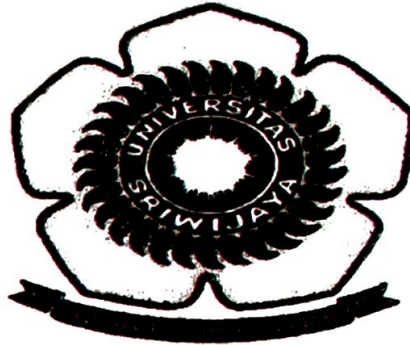
R 21232
21696

S
332.07
Adi
P
CV. → 130494
2012

cy



**PENGARUH BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA
DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



Skripsi Oleh :

ADI SUPARDI
01071002084

Ekonomi Pembangunan

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

(2012)

LEMBAR PERSETUJUAN KOMPREHENSIF

PENGARUH BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Disusun oleh:

Nama : Adi Supardi
Nim : 01071002084
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

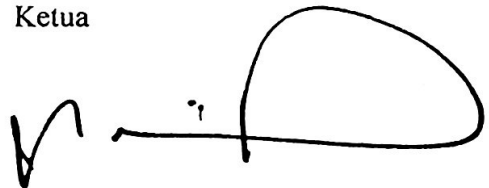
Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan

Tanggal $\frac{1}{10}$ 12
:

Dosen Pembimbing

Ketua



Prof.H.Syamsurijal AK,Ph.D
NIP: 195219191981021001

Tanggal $\frac{1}{10}$ - 2012
:

Anggota



Yunisvita, SE, M.Si
NIP: 132325694

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Disusun oleh:

Nama : Adi Supardi
Nim : 01071002084
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 17 Oktober 2012 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 23 Oktober 2012

Ketua



Prof.H.Syamsurijal AK,Ph.D
NIP: 195219191981021001

Anggota



Yunisvita, SE, M.Si
NIP: 132325694

Anggota



Dr.Azwardi, M.Si
NIP:196805181993031003

Mengetahui.
Ketua Jurusan



Dr.Azwardi, M.Si
NIP:196805181993031003

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Adi Supardi
NIM : 01071002084
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Ekonomi Keuangan Daerah
Fakultas : Ekonomi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul: Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin

Pembimbing:

Ketua : Prof.H.Syamsurijal AK,Ph.D
Anggota : Yunisvita, SE, M.Si
Tanggal Ujian : 17 Oktober 2012

adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Inderalaya, 24 Oktober 2012
Pembuat Pernyataan,



Adi Supardi
NIM: 01071002084

RIWAYAT HIDUP



Nama Mahasiswa : Adi Supardi
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat /Tanggal Lahir : Bailangu 12 Agustus 1988
Agama : Islam

Alamat Rumah : Jalan Laut Dusun III Desa Bailangu Timur
Alamat Email : adilee181@yahoo.com

Pendidikan Formal :

Sekolah Dasar : SD Negeri 2 Bailangu
SLTP : SLTP Negeri 7 Sekayu
SMU : SMU Negeri 1 Sekayu

Pendidikan Non Formal : -

Pengalaman Organisasi : Anggota divisi mibak HIMEPA periode 2008-2009
Anggota divisi akademis HIMEPA periode 2009- 2010
Ketua divisi Mibak BEM Fakultas Ekonomi periode 2010-2011

Penghargaan Prestasi : -

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia –Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai pengaruh belanja dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan
3. Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan
4. Para Dosen Penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran
5. Orang tua

Inderalaya, 24 Oktober 2012

Penulis

ABSTRAK

PENGARUH BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Oleh:
Adi Supardi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan pada suatu tahun tertentu yang besarnya dinyatakan dalam jutaan rupiah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data time series tahunan periode 2001-2010 yang diperoleh dari BPS Kota Palembang, BPS Kabupaten Musi Banyuasin dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin. Variabel yang digunakan adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan regresi linier berganda metode *OLS* (*Ordinary Least Square*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal secara bersama-sama maupun parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin.

Kata Kunci: *Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal*

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF PERSONEL EXPENDITURE, GOODS AND SERVICES EXPENDITURES, AND CAPITAL EXPENDITURE ON ECONOMIC GROWTH OF THE DISTRICT MUSI BANYUASIN

By Adi Supardi; Prof. H. Syamsurijal, AK.,Ph.D. and Yunisvita, SE, M.Si.


This study was aimed at finding out to what extent the personnel expenditure, goods and services expenditures, and capital expenditure influenced the economic growth of the district Musi Banyuasin. Economic growth is the increase of the economy in producing goods and services which were calculated based on the GDP at constant prices in any given year stated in millions of Rupiahs.

The data used in this study were secondary ones based on annual time series data in the period of 2001 through 2010 obtained from the Palembang Central Statistical Agency, Banyuasin Central Statistical Agency, and Financial Income Management Services and Regional Asset of District Banyuasin. Variables used were the personnel expenditure, goods and services expenditure, capital expenditure and economic growth. Qualitative and quantitative analysis techniques using Ordinary Least Square multiple linear regression methods were used to analyze the data.

The results showed that personnel expenditure, goods and services expenditure, and capital expenditure shared equally and partially positive and significant influence on economic growth of District Banyuasin.

Keywords: Economic Growth, Personnel Expenditures, Goods and Services Expenditures, Capital Expenditures

This is a true and correct translation of the original document,



Ida Rosmalina, S.Pd.,M.Pd.

Secretary of Language Laboratory, Graduate School of Sriwijaya University

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4 Sistematika Skripsi	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi	11
2.1.1.1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi	11
2.1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Regional	12
2.1.1.3 Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah	14
2.1.1.4 Teori Pertumbuhan Schumpeter	14
2.1.1.5 Teori Pertumbuhan Klasik	16
2.1.1.6 Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional Neo Klasik	16

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	17
2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	18
2.1.3.1 Belanja Daerah	20
2.1.3.2 Klasifikasi Belanja Daerah	21
2.1.4 Teori Pengeluaran Pemerintah	26
2.1.4.1 Teori Pengeluaran Musgrave dan Rostow	26
2.1.4.2 Hukum Wagner	27
2.1.4.3 Pengeluaran Pemerintah Versi Keynes	29
2.1.4.4 Teori Peacock dan Wisemen	31
2.1.4.4 Teori Makro Pengeluaran Pemerintah	32
2.1.4.5 Teori Mikro Pengeluaran Pemerintah	33
2.2 Penelitian Sebelumnya	33
2.3 Kerangka Pemikiran	35
2.4 Hipotesis Penelitian	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	38
3.2 Rancangan Penelitian	38
3.3 Sumber Data	38
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	39
3.5 Teknik Analisis	40
3.5.1 Teknik Analisis Kualitatif	40
3.5.2 Teknik Analisis Kuantitatif	40
3.5.2.1 Uji Penyimpangan Klasik	41
3.5.2.2 Uji Statistik	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Ruang Lingkup Penelitian	47
4.1.1 Gambaran Umum Perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin	47

4.1.1.1 Perkembangan PDRB Kabupaten Musi Banyuasin	47
4.1.1.2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	52
4.1.2 Hasil Perhitungan Estimasi	56
4.1.2.1 Hasil Estimasi Model Regresi Berganda Metode OLS	56
4.1.2.2 Uji Asumsi Klasik	58
4.1.2.3 Hasil Uji Statistik	63
4.2 Pembahasan	65
4.2.1 Analisis Kuantitatif Hasil Estimasi Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin	66
4.2.2 Analisis Kuantitatif Hasil Estimasi Belanja Pegawai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin	67
4.2.3 Analisis Kuantitatif Hasil Estimasi Belanja Barang Dan Jasa Terhadap Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin	68
4.2.4 Analisis Kuantitatif Hasil Estimasi Belanja Modal, Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	71
5.3 Keterbatasan Penelitian	72
Daftar Pustaka	73
Lampiran-Lampiran	75

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Perkembangan PDRB Atas Harga yang Berlaku Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2001 – 2010 (Juta rupiah)	47
Tabel 4.2 PDRB Atas Harga yang berlaku menurut lapangan usaha tahun 2007-2010 Kabupaten Musi Banyuasin (Juta Rupiah)	50
Tabel 4.3 Distribusi PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Harga yang Berlaku menurut lapangan usaha tahun 2007 - 2010 (%)	51
Tabel 4.4 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2001-2010 (Juta Rupiah)	54
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas Metode Korelasi Parsial	59
Tabel 4.6 Regresi Heterokedastisitas Menggunakan Metode Glejser	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Pertumbuhan pengeluaran pemerintah menurut Wagner	28
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	36
Grafik 4.1 Perkembangan PDRB Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan harga yang berlaku	49
Grafik 4.2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	56
Gambar 4.3 Uji Normalitas	61

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Tabel Hasil Estimasi Model Regresi Berganda	
Metode OLS	73
Lampiran 2 Hasil Uji Multikolinearitas Metode Parsial	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan. Hasil pertumbuhan ekonomi tersebut harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, baik lapisan masyarakat bawah, menengah maupun lapisan masyarakat atas baik dengan campur tangan atau pun tanpa campur tangan dari pemerintah. Pertumbuhan ekonomi ini hendaknya berdampak pada pembangunan nasional yang bisa meningkatkan taraf kehidupan sosial masyarakat sesuai dengan tujuan dari pembangunan nasional berdasarkan UUD 1945.

Suatu perekonomian dikatakan meningkat apabila ada proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil, jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Ekonomi yang tumbuh adalah ekonomi dimana titik keseimbangan antara permintaan agregat (jumlah permintaan total terhadap barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama periode tertentu) dan penawaran agregat (jumlah total barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama periode tertentu) semakin baik dibandingkan periode sebelumnya dan pertumbuhan ekonomi tersebut menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang.

Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada dimasing-masing daerah, oleh karena itu pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri (Ghofir, 2000). Untuk itu tahun 2000 diberlakukan otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Suparmoko, 2001).

Dalam rangka melakukan pembangunan tersebut pemerintah daerah memerlukan pembiayaan dengan mengumpulkan sumber-sumber dana (pendapatan) untuk membiayai seluruh pengeluaran yaitu pengeluaran langsung dan pengeluaran tidak langsung. Agar terwujudnya sasaran yang tepat dalam pengumpulan dan pengeluaran dana tersebut maka pemerintah daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Oleh karena APBD adalah dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan jumlah tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya dalam jumlah yang cukup.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah dan belanja daerah. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,

penerimaan sumber daya alam serta dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Belanja daerah merupakan belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Belanja daerah menurut kelompok belanja berdasarkan Permendagri No 13/2006 terdiri atas: (1) belanja tidak langsung dan (2) belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Dikelolanya APBD oleh pemerintah daerah masing-masing tanpa ada campur tangan pemerintah pusat dalam rangka perwujudan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal membuat pemerintah daerah lebih leluasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya untuk mensejahterakan masyarakat di daerahnya. Dalam rangka pelaksanaan otonomi tersebut tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan otonomi sepenuhnya didalam implementasinya diperlukan dana yang memadai. Oleh karena itu, melalui undang-undang No.33 tahun 2004 kemampuan daerah untuk memperoleh dana dapat ditingkatkan.

Sebagai daerah otonom, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang menjadi sumber PAD maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka desentralisasi itulah maka daerah-daerah diberi otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri karena makna substantif otonomi itu sebenarnya adalah pengakuan pentingnya kemandirian.

Implikasi lain yang sangat penting dari pengurusan kewenangan tersebut adalah semakin meningkatnya kebutuhan daerah dan pembiayaan penyelenggaraan aktivitas pemerintah dan pembangunan juga akan semakin besar. Oleh karenanya pemerintah daerah harus dapat bertindak sekaligus bersikap efisien dan efektif serta berprinsip melakukan *partnership* dengan kelompok-kelompok masyarakat yang potensial. Dengan demikian, peran investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*enginee of growth*). Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan efek multiplier yang besar.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah atau sektor publik, menjadi subyek penting dan menarik untuk dianalisis karena sektor

ini dapat menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (*long run steady state growth economy*). Fakta menunjukkan bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi tidak ada yang konsisten, bisa positif atau negatif. Bukti dan hasilnya berbeda di setiap negara maupun di daerah. Sifat dari pengeluaran publik/pemerintah akan tergantung kondisinya (Barro,1990).

Hal ini juga ditegaskan oleh penelitian lainnya bahwa kontribusi pengeluaran produktif positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebaliknya untuk pengeluaran tidak produktif hasilnya negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Folster dan Henrekson,1999). Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu faktor lain yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. pengeluaran pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi tetapi pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Selatan dimana sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Musi Banyuasin. Pada tahun 2008 laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Musi Banyuasin dengan harga berlaku adalah sebesar 19,65 persen, laju pertumbuhan mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi -7,41 persen dan mengalami kenaikan kembali menjadi 12,90 persen pada tahun 2010. Belanja pemerintah daerah pada

tahun 2008 untuk belanja pegawai sebesar Rp 370.846.000.000, untuk belanja barang dan jasa adalah sebesar Rp 204.865.000.000 dan belanja modal adalah sebesar 845.360.000.000. Pada tahun 2009 belanja pemerintah daerah untuk belanja pegawai mengalami peningkatan menjadi Rp 370.846.000.000, untuk belanja barang dan jasa juga mengalami kenaikan menjadi Rp 231.217.000.000 sedangkan belanja modal mengalami penurunan menjadi Rp 527.050. 000.000 Pada tahun 2010 pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 536.923.000.000, untuk belanja barang dan jasa juga kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 30.6997.000.000 dan untuk belanja modal kembali mengalami penurunan menjadi Rp 525.697.000.000. Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **"Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin"**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian adalah seberapa besar pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin baik secara bersama–sama maupun parsial.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja barang dan jasa terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Musi Banyuasin.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja daerah modal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Musi Banyuasin.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan tentang informasi APBD di Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Untuk memberikan informasi tentang pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

1.5. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori dalam penelitian, yaitu mengenai pengaruh belanja modal, belanja pegawai dan belanja barang dan jasa terhadap pertumbuhan ekonomi, penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab berisi tentang ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang meliputi pengaruh belanja modal, belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang dianalisis secara bersama-sama maupun secara parsial, pengukuran koefisien korelasi, pengukuran koefisien determinasi dan pengukuran koefisien regresi serta pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan analisis kualitatif.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data, saran untuk pengembangan bagi peneliti selanjutnya dan keterbatasan-keterbatasan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2012. "Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Dan Relevansinya Dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa – Bali)". *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin* Vol XXI No 1, (1-19).
- Abustan dan Mahyuddin. 2009. "Analisis Vector Auto Regressive (VAR) Terhadap Korelasi Antara Belanja Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan Tahun 1985-2005". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 10 No 1.
- Armansyah, Armin 2004. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Indonesia. *Tesis*, Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan (tidak dipublikasi).
- Arsyad, Lincolin. 2002. *"Pengantar Perencanaan Pembangunan daerah*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Asngari, Imam. 2007. *Modul Praktikum Ekonometrika Program Eviews dan SPSS*. Inderalaya: Universitas Sriwijaya.
- Boediono. 1999. *Teori Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: LPFE.
- Damanik, Doni. 2011. Analisis Kausalitas Pengeluaran Pendidikan Dan Ekonomi Di Sumatera Utara. *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, Medan (tidak dipublikasi).
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Magister Sains Ilmu-ilmu Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Universitas Gadjah Mada Jogjakarta. *SNA X, Makassar*.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Dina Pertiwi, Lena. "Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah di Propinsi Jawa Tengah". *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol 1. No. 2. (123 – 139).
- Dumairy. 1999. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

- Elmi, Bachrul. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Folster, S. and M. Henrekson. 1999” Growth and Public Sector: a critique of the critics”, *Europe Journal of Political Economy*, 15:2, (337-358).
- Jhingan, M.L. 1999. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jhingan, M.L. 2007. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kamaluddin, Rustian. 1998. *Pengantar Ekonomi Pembangunan Edisi kedua*. LPFE UI, Jakarta.
- Kuncoro Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mahyudi, Ahmad. 2004. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Martin, Erlina. 2010. Analisis Hubungan Kausalitas antara Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, Medan (tidak dipublikasi).
- Muhammad, Abrar. 2010. ”Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol 9 No.1.
- Nining. 2004. Peranan APBD Dalam Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara. *skripsi*, Universitas Sumatera Utara, Medan (tidak dipublikasi).
- Nurlina. 2004. Analisis Pengaruh Anggaran Belanja Rutin Dan Anggaran Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nanggroe Aceh Darussalam. *skripsi*, Universitas Sumatera Utara, Medan (tidak dipublikasi).
- Saragih, Juli Panglima, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonom*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sodik, Jamzani. 2007. ”Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol 12 No. 1. (27 – 36).

- Soeparno, Wahyu Sugeng Imam U. 2010. Analisis Indikator Makro Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, Medan (tidak dipublikasi).
- Suparmoko. 2000. *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek*. Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta.
- Sukirno, Sadono.1985. *Ekonomi Pembangunan: Proses Masalah dan Dasar Kebijakan Pembangunan*. LPFE UI. Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus. 2001. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta. Penerbit Ghalia.
- _____, *Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka*, Berbagai Tahun, Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin.
- _____, *Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Musi Banyuasin*, Berbagai Tahun, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Bayuasin.